



Puluhan PKL Teras Malioboro II menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Jogja, Jumat (8/9). Dalam aksinya, mereka menuntut adanya transparansi tentang relokasi tahap kedua.

► PENATAAN MALIOBORO

PKL Minta Dilibatkan dalam Relokasi

UMBULHARJO—Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Teras Malioboro II menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Jogja, Jumat (8/9). Dalam aksinya, mereka menuntut agar dilibatkan dalam rencana relokasi untuk pedagang yang berjualan di Teras Malioboro II.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Pelibatan para PKL dalam relokasi menjadi tuntutan utama mereka dalam demo dan audiensi tersebut. Tak hanya karena rencana relokasi, ratusan PKL juga mengungkapkan masalah dari relokasi yang pernah terjadi sebelumnya pada 2022. "Setelah relokasi pertama pada 2022, pendapatan kami menurun drastis.

- Pelibatan para PKL dalam relokasi menjadi tuntutan utama mereka dalam demo dan audiensi tersebut.
- Arif meminta UPT Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Budaya Jogja sebagai pengelola mendata PKL secara transparan dan terbuka.

Selain itu, infrastruktur yang ada kami rasa tidak layak, minimnya ruang dialog dan transparansi dari para pemangku kebijakan, dan semuanya masih terus menjadi polemik," kata salah satu pengurus Paguyuban Tri Dharma PKL Malioboro, Arif Usman dalam pertemuan dengan anggota Dewan, Jumat (8/9).

Masalah dari relokasi sebelumnya tersebut membuat ratusan PKL Malioboro khawatir dengan adanya rencana relokasi kedua yang akan dilakukan Pemkot Jogja. "Relokasi jilid dua yang simpang siur tentunya membuat gaduh, menambah persoalan bagi para pedagang. Kemudian penataan ulang untuk para pedagang dalam

pelaksanaannya terkesan ditutup-tutupi dan diskriminatif," kata Arif. Paguyuban Tri Dharma PKL Malioboro, menurut Arif, menuntut Pemkot Jogja agar melibatkan paguyuban pedagang yang ada, mulai dari pra-relokasi hingga penempatan di Teras Malioboro II. Mereka juga meminta ada tindakan tegas terhadap oknum pedagang yang tidak berhak tetapi menempati lapak di Teras Malioboro II. "Teras Malioboro II ini diperuntukkan bagi PKL sepanjang Malioboro sebelum relokasi, artinya jangan ada pedagang baru sebelum pedagang lama memperoleh lapak," katanya.

Arif juga meminta UPT Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Budaya Jogja sebagai pengelola mengadakan

pendataan PKL yang transparan dan terbuka. "Kami juga menuntut Pemkot Jogja membuka akses partisipasi dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh PKL Malioboro," katanya.

Secepat Berkoordinasi

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko menerima aspirasi PKL Malioboro tersebut. "Kami akan tindak lanjut audiensi ini, nanti dari Komisi D akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, dan Komisi B akan berkoordinasi soal perdagangannya supaya hak para PKL terpenuhi," katanya.

Danang menyebut DPRD Kota Jogja akan mengawal masalah ini, dan dijadwalkan pertemuan selanjutnya digelar pada 18 September nanti. "Kami komitmen untuk terus mengawal, pertemuan selanjutnya akan dilakukan untuk *update* hasil-hasil yang ada," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005